



**ANALISIS KEMISKINAN PETANI DI KECAMATAN KAPONGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

***ANALYSIS OF FARMER'S POVERTY IN KAPONGAN
DISTRICT SITUBONDO REGENCY***

Tesis Diserahkan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Jember untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Ekonomi

Oleh:

Rahmat Fauzi, S.STP.

NIM. 130820201037

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu program pemerintah (dalam RPJMN) meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) adalah pedoman yang berisi visi, misi dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pemerintah selama periode 5 tahun. Program RPJMN tahun 2015-2019 yang menjadi salah satu fokusnya menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus diselesaikan. Kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan secara terpadu (Nasir, 2008).

Chambers (dalam Suryawati, 2005) menyatakan bahwa kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low-level of security*), dan ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*). Selanjutnya Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. *World Bank* (2008) mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari US\$ 1 per hari. Menurut BPS (2009), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan yang didasarkan kepada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan

sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan).

Data BPS tahun 2013 periode Bulan Maret, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 10,51 juta orang, sementara di daerah pedesaan mencapai 18,08 juta orang. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia sebesar 15,82 juta orang. Memahami masalah kemiskinan di Indonesia, perlu diperhatikan lokalitas daerah artinya pengurangan angka kemiskinan pada tingkat lokal keberhasilannya ditentukan oleh komunitas dan pemerintah setempat. Lokalitas daerah diantaranya yaitu kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran dan pemecahan masalah, sehingga upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih objektif dan tepat sasaran.

Data BPS tahun 2013 periode Bulan Maret Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak sebesar 4.960,54 juta orang, sementara jumlah penduduk miskin terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 366,77 juta orang. Secara teoritis kemiskinan terbagi menjadi 2 pola yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata.

Ditinjau dari faktor ketidakseimbangan pembangunan, kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata, dapat dipastikan jika kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan. Perbandingan kemiskinan antara desa-kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa

| Provinsi | Jumlah Penduduk Miskin (000) | | | Persentase Penduduk Miskin (%) | | |
|---------------|------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|-------|-----------|
| | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa |
| DKI Jakarta | 366,77 | | 366,77 | 3,70 | | 3,70 |
| Jawa Barat | 2.560,02 | 1.861,46 | 4.421,48 | 8,71 | 12,13 | 9,89 |
| Jawa Tengah | 1.946,51 | 2.916,90 | 4.863,41 | 13,11 | 16,55 | 14,98 |
| DI Yogyakarta | 306,51 | 255,60 | 562,11 | 13,10 | 21,29 | 15,88 |
| Jawa Timur | 1.605,96 | 3.354,58 | 4.960,54 | 8,90 | 16,88 | 13,08 |
| Banten | 333,45 | 314,80 | 648,25 | 4,41 | 8,31 | 5,71 |
| Jawa | 7.119,22 | 8.703,35 | 15.822,57 | 8,67 | 15,05 | 11,31 |

Sumber: BPS, 2013.

Laporan BPS tahun 2013 menyatakan bahwa faktor-faktor kemiskinan merupakan gabungan dari faktor internal dan faktor eksternal. Keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah merupakan faktor internal. Kebijakan pembangunan yang keliru dan korupsi yang menyebabkan alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan termasuk dalam faktor eksternal. Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal seperti, masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2012

| No | Desa | Pra Sejahtera | Keluarga Sejahtera I | Total |
|----|---------------|---------------|----------------------|-------|
| 1 | Kandang | 437 | 598 | 1.035 |
| 2 | Curah Cotok | 241 | 155 | 396 |
| 3 | Peleyan | 286 | 151 | 437 |
| 4 | Wonokoyo | 374 | 297 | 671 |
| 5 | Seletreng | 503 | 870 | 1.373 |
| 6 | Landangan | 398 | 211 | 609 |
| 7 | Kapongan | 147 | 259 | 406 |
| 8 | Kesambirampak | 339 | 692 | 1.031 |
| 9 | Gebangan | 397 | 349 | 746 |
| 10 | Pokaan | 438 | 317 | 755 |
| | Total | 3.560 | 3.899 | 7.459 |

Sumber: Kapongan dalam Angka, 2012.

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Kapongan pada tahun 2012 yang total mencapai 7.459 keluarga miskin. Kecamatan Kapongan terdiri dari 10 desa, dimana Desa Seletreng menjadi desa yang memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak yaitu 1.373 keluarga miskin, disusul Desa Kandang sebanyak 1.035 keluarga miskin dan Desa Kesambirampak sebanyak 1.031 keluarga miskin. Sedangkan desa yang memiliki jumlah keluarga miskin paling sedikit adalah Desa Curah Cotok sebanyak 396 keluarga miskin, Desa Kapongan sebanyak 406 keluarga miskin dan Desa Peleyan sebanyak 437 keluarga miskin.

Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (2005:50), menyatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan ada 2 yaitu eksogen (alam dan struktural) dan endogen (kultural). Faktor endogen dipengaruhi sistem nilai budaya masyarakat setempat, yaitu orientasi nilai budaya dan sikap mental penduduk miskin terhadap hakekat hidup, hakekat karya, hakekat waktu, hakekat hubungan dengan alam dan hakekat hubungan dengan sesama. Kelima masalah pokok tersebut memiliki orientasi nilai budaya yang masing-masing menghasilkan suatu sikap mental. Sikap mental tersebut bisa sejalan atau tidak sejalan dengan upaya peningkatan taraf hidup warga miskin.

Nasir (2008) menyatakan bahwa pemerintah selalu mencanangkan program-program penanggulangan kemiskinan akan tetapi jumlah penduduk miskin Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur tidak juga mengalami penurunan. Data di BPS (2012) menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, akan tetapi secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada: 1) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM; 2) peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar, pangan dan gizi); 3) pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan

posisi tawar masyarakat miskin; serta 4) perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat antara lain P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, dan P2MPD.

Masyarakat miskin mempunyai karakteristik, umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi (Kartasasmita, 1996:4). Pembangunan bertujuan meningkatkan kemandirian. Sektor pertanian memiliki potensi SDA dikombinasikan dengan hak penguasaan lahan dan SDM yang berkualitas, sehingga SDA tersebut mampu dikelola dengan baik melalui penerapan teknologi maju, guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat petani. Liberalisasi ekonomi dengan sistem pasar yang mengutamakan efisiensi, bukan saja mengakibatkan hilangnya kesempatan berusahatani bagi petani, namun juga makin longgar dan melemahnya ikatan sosial yang terjalin dalam masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu revitalisasi melalui peningkatan peran (pemberdayaan) petani sebagai aset pembangunan sangat dibutuhkan. Pada era liberalisasi ekonomi perlunya proses efisiensi usaha tani guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Pemerataan akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi (lahan dan modal) dan jaringan pasar, serta bertumpu pada keseimbangan ekologi sehingga dapat berkelanjutan.

Penyebab kemiskinan petani lebih disebabkan kondisi struktural sehingga diperlukan perubahan struktural untuk mengatasinya. Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumarjan (2001:5) mengatakan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Hal ini dikarena kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum. RPJMN memiliki 3 prioritas agenda pembangunan yaitu peningkatan kualitas SDM, perkembangan kemampuan IPTEK dan penguatan daya saing perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa

kondisi struktural menjadi fokus utama pemerintah. Pada pembangunan di bidang pertanian, pemerintah mengagendakan reformasi agraria dan program-program pembiayaan pertanian yang mudah diakses petani. Salah satu bentuknya pemberdayaan petani merupakan upaya menciptakan iklim (suasana) kondusif, untuk membangkitkan kesadaran berkembangnya potensi yang dimiliki dengan mendorong, memotivasi, menciptakan/membuka aksesibilitas berbagai peluang, mengurangi atau bahkan menghilangkan intervensi dan dominasi pemerintah terhadap perbaikan sistem dan mekanisme pemasaran komoditas. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu gagasan atau ideologi baru tentang perekonomian yang mencoba merumuskan dasar interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Pertimbangan ekonomi kerakyatan dan efisiensi menjadi dasar penyesuaian dalam upaya pemberdayaan petani demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga di pedesaan.

Persebaran dari kemiskinan yang terjadi pada suatu kawasan bisa membentuk suatu pola karakteristik dari persebaran kemiskinan yang sering disebut dengan kantong kemiskinan. Salah satu fenomena yang muncul adalah semakin jauh suatu tempat dari titik pertumbuhan (*growth centre*) akan semakin tingkat kemiskinan penghuninya. Titik pertumbuhan itu sendiri biasanya berlokasi di perkotaan yang merupakan pusat administrasi pemerintahan, pusat perdagangan, serta pusat dari berbagai fasilitas sosial dan ekonomi. Selain itu persebaran dari kantong kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada karakteristik dan ciri dari kantong kemiskinan tersebut, yaitu:

- a. Daerah Terpencil (*Remote Area*) yaitu daerah yang jauh dari titik pertumbuhan yang hampir tidak/belum tersentuh oleh pembangunan.
- b. Daerah Perdesaan (*Rural Area*), secara relatif daerah perdesaan lebih miskin dari daerah perkotaan. Lebih spesifik lagi, yang dimaksud dengan daerah perdesaan di sini adalah daerah yang basis perekonomiannya dari sektor pertanian.
- c. Daerah Pinggiran Kota (*Sub-urban Area*). Masyarakatnya dapat dikategorikan berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan perekonomiannya dan potensial untuk menjadi miskin.
- d. Daerah Kumuh Perkotaan (*Urban Slum*).

Secara empiris terdapat dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan. Substansi penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan penelitian mengenai permasalahan kemiskinan petani yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Permasalahan tersebut:

- a. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi kemiskinan petani yang berada di daerah pedesaan (*rural area*).
- b. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh menyebabkan kemiskinan petani. Secara teoritis faktor yang ditelaah diantaranya: karakteristik wilayah; struktur ekonomi dan sosial; sarana dan prasarana; SDM dan kearifan lokal/budaya.
- c. Formulasi dari kebijakan pemerintah daerah yang mendukung terhadap strategi untuk mengurangi masalah kemiskinan petani di Kabupaten Situbondo.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 17 kecamatan dan 136 desa/kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Situbondo yang terdiri dari masyarakat pesisir yang mayoritas bermata

pencapaian sebagai nelayan dan masyarakat non pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Hal ini mempengaruhi corak, budaya, akses ekonomi, informasi dan akses lainnya sehingga dimungkinkan mengurangi peluang suatu masyarakat di daerah tertentu untuk menikmati hal yang sama dengan masyarakat yang relative memiliki karakteristik struktural berbeda.

Kondisi yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain tentunya terdapat perbedaan dalam hal akses masyarakat terhadap sarana ekonomi dan fasilitas lainnya. Diperlukan adanya pemerataan dengan memahami kondisi masing-masing wilayah, sehingga penanganan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik. Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo masih relatif tinggi. Menurut data BPS, tahun 2013 saja jumlah rumah tangga miskin mencapai 98.600 rumah tangga miskin. Kalaupun diprosentase jumlahnya 15,11% dari total rumah tangga yang ada. Tren yang terjadi sejak 2009, jumlah rumah tangga miskin di Situbondo fluktuatif menurun walaupun volumenya masih kecil. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 2,14% dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,49%.

Kecamatan Kapongan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang memiliki persebaran rumah tangga petani yang besar. Hasil sensus pertanian Kabupaten Situbondo pada tahun 2013 terdapat 9.161 rumah tangga tani di Kecamatan Kapongan. Hal ini menjadi dasar Kecamatan Kapongan menjadi lokasi penelitian. Selain itu karakteristik petani di Kecamatan Kapongan yang guyup, memiliki struktur organisasi kelompok tani yang baik, dan sistem pertanian baik tampak dari rata-rata produksi tanaman padi sawah per hektar mencapai 6 ton/Ha, jagung sebesar 4 ton/Ha, kedelai sebesar 1 ton/Ha dan kacang tanah sebesar 1,07 ton/Ha (BPS, 2012) dapat mewakili karakteristik petani di Kabupaten Situbondo secara keseluruhan dengan problematika atau kendala-kendala petani yang tidak jauh berbeda. Penelitian ini lebih berfokus pada tingkat kemiskinan berdasarkan pada indikator kemiskinan dari BPS. Hal ini dikarenakan indikator kemiskinan dari BPS adalah indikator yang digunakan pemerintah Indonesia dalam menentukan standar masyarakat miskin yang berhak memperoleh dana BLT.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan suatu wilayah khususnya pedesaan memiliki faktor-faktor yang bervariasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor kemiskinan petani di kawasan pedesaan khususnya yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

- a. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi petani miskin yang berada di kawasan pedesaan (*rural area*)?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi petani miskin di kawasan pedesaan?
- c. Bagaimana formulasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi petani miskin di kawasan pedesaan Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi petani miskin yang berada di kawasan pedesaan (*rural area*).
- b. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan petani miskin di kawasan pedesaan.
- c. Memformulasikan kebijakan yang mendukung untuk mengurangi petani miskin di kawasan pedesaan Kabupaten Situbondo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberi kontribusi kepada:

- a. Bagi pengambil kebijakan
 1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk memahami faktor-faktor kultural yang mempengaruhi kemiskinan petani.
 2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar untuk memberikan solusi yang tepat dan informasi pendukung dalam pengembangan kultural positif bagi petani.

b. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya teori ekonomi pembangunan yang menjelaskan bahwa kemiskinan secara kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya.

c. Bagi penulis

Dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Manusia (*People Center Development*)

Konsep *human development* atau pembangunan manusia dibahas oleh UNDP untuk pertama kalinya pada era kotemporer dalam *Human Development Report* tahun 1990. Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk menguntungkan manusia (masyarakat), maka PDRB tidak secara langsung menjamin *human development*, karena terkadang hanya mementingkan pihak elit politis dan ekonomi. Gagasan model pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati hidup yang panjang, sehat dan kreatif. UNDP memberikan pendefinisian pembangunan manusia adalah proses memperbesar pilihan rakyat, dimana masyarakat menjadi kritis untuk dapat menjalani hidup yang sehat, terdidik dan memiliki standar hidup yang layak. Pilihan tambahan lainnya adalah kebebasan politik dan terjaminnya HAM serta penghormatan terhadap diri sendiri (UNDP HDR, 1990:9-10). Menurut Haq (1995) *human development* terdiri dari 5 karakteristik dan 4 komponen yang membentuknya, yaitu:

- a. Pertama *human development* memusatkan perhatian kepada manusia, “*people in the center of the stage*”, sehingga pendekatan pembangunan itu diartikan seperti aksi perluasan pilihan atau alternatif bagi rakyat, “*expanding people’s choices*”. Dalam semua proses pembangunan dipertanyakan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan juga mendapatkan manfaat dari pembangunan.
- b. Kedua menekankan kepada kedua sisi yang dimiliki pembangunan manusia, yaitu *formation of human capabilities* (peningkatan *health, knowledge* dan *skills*) dan *people use of acquired capabilities* (untuk pekerjaan, kegiatan produktif, partisipasi dalam urusan politik, dan lainnya). Hal itu bermaksud bahwa proses pembangunan seharusnya memperdaya masyarakat dengan menyediakan berbagai institusi atau prasarana untuk meningkatkan

kapabilitas manusia, sehingga mereka mampu berkreaitivitas di tengah masyarakat untuk juga mendorong pembangunan.

- c. Ciri ketiga adalah bahwa untuk memperluas pilihan bagi rakyat diperlukan *means*, yaitu pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan *Gross National Product*. Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis memberi kesejahteraan masyarakat, tetapi harus didistribusikan secara merata melalui kebijakan yang jelas.
- d. Keempat, *human development* merupakan sebuah teori dan pendekatan yang menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Perhatian tidak hanya terfokus kepada faktor ekonomi tetapi kepada semua faktor yang menyangkut suatu wilayah.
- e. Cirinya kelima adalah diakui bahwa manusia merupakan tujuan, juga sarana daripada pembangunan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai sarana untuk mencapai *human development*.

Sementara empat komponen penting dalam paradigma *human development* ialah *equity*, *sustainability*, *productivity* dan *empowerment*. *Equity* berarti bahwa dalam memperluas pilihan dan kesempatan untuk manusia harus ada keadilan, berarti akses terhadap kesempatan yang merata. Di sini juga ditekankan istilah *growth with equity by income distribution*, bahwa peningkatan GNP didistribusikan kepada masyarakat, melalui kebijakan fiskal yang optimal, *land reform*, akses kepada kredit, kesempatan politik, dan penghapusan hambatan sosial atau legal yang membatasi kaum minoritas kepada kesempatan ekonomi dan politik.

Sustainability adalah komponen yang sangat penting juga yang berarti bahwa, tingkat kesejahteraan yang dinikmati masa kini harus juga bisa dinikmati oleh generasi mendatang, jadi *sustanaibility* di sini adalah kelestarian daripada *human development opportunities*. Dengan kata lain kelestarian dari semua capital adalah kapital fisik, finansial, lingkunang hidup, dan sumber daya manusia, dengan kapasitas memperbaruhi dan meregenerasi kapital tersebut.

Productivity merupakan satu elemen dalam *human development* dimana pentingnya adalah sama dengan *equity*, *sustainability* dan *empowerment*. *Productivity* berarti peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui

investment in people agar potensial maksimal mereka dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan. Di sini manusia dilihat sebagai sarana atau partisipan dari pembangunan namun *human development* menggarisbawahi bahwa manusia adalah *means* dan juga *the ultimate ends of development*, oleh karena itu konsep *productivity* dianggap hanya sebagai suatu unsur dalam *human development*.

Empowerment bermaksud pembangunan berdasarkan partisipasi penuh masyarakat, masyarakat bukan hanya sebagai penerima tetapi aktif dalam menentukan pilihan mengenai bagaimana seharusnya hidup mereka sendiri dibentuk. Pemberdayaan masyarakat menurut Haq (1995) adalah investasi dalam pendidikan dan kesehatan supaya masyarakat dapat mengambil keuntungan dari peluang ditawarkan pasar; akses kepada kredit dan *productive assets*; juga pemberdayaan yang sama kepada wanita dan pria agar mempunyai kesempatan bersaing yang setara. Dengan demikian memerlukan *political democracy*, *economic liberalism*, desentralisasi dan partisipasi dari organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya (Haq, 1995: 16-19).

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok yaitu: a) materi yang dihasilkan dan dibagi; b) masalah manusia yang menjadi manusia pembangunan. Para ahli ekonomi memang berbicara tentang SDM atau sumber daya manusia. Tetapi pembicaraan tentang manusia lebih menekankan aspek keterampilan. Dengan demikian, manusia dianggap sebagai masalah teknis untuk peningkatan produksi saja. Dengan demikian, masalah manusia dilihat sebagai masalah teknis untuk peningkatan keterampilan, melalui bermacam sistem pendidikan (Budiman, 2000:14). Pada titik ini, berbicara tentang faktor-faktor non-material, seperti adanya rasa aman, rasa bebas dari ketakutan, dan sebagainya. Hanya dengan diciptakannya suasana ini, kondisi yang merangsang kreativitas (yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia pembangunan yang punya inisiatif dan dapat memecahkan bermacam persoalan) dapat diselenggarakan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material. Selain itu pembangunan juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia bisa mengembangkan kreativitasnya. Pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia.

Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, manusia tersebut harus merasa bahagia, merasa aman dan bebas dari rasa takut. Hanya manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dijumpainya.

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Korten (dalam Hikmat, 2004:15-16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat:

- a. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
- b. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.
- c. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan

salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang bersifat mendesak dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung, dan peran-peran lainnya yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi pemerintah.

2.1.2 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah gambaran dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kehidupan yang layak, namun kemiskinan itu memiliki ciri yang berbeda antar wilayah, perbedaan ini terkait pada kemiskinan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan setempat. Dikemukakan oleh Friedman (1992:89) adalah sebagai berikut:

- a. *Poverty Line* (garis kemiskinan), yaitu tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan *income* yang dua pertiganya digunakan untuk keranjang pangan yang dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan protein utama yang paling murah.
- b. *Absolute and Rrelative Poverty* (kemiskinan absolut dan relatif), adalah kemiskinan yang jatuh di bawah standar konsumsi minimum dan karenanya tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan relatif adalah kemiskinan yang eksis di atas garis kemiskinan absolut yang sering dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok non miskin berdasarkan *income* relatif.
- c. *Deserving Poor* adalah kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang-orang non-miskin, bersih, bertanggung jawab, mau menerima pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan.

d. *Target Population* adalah kelompok orang tertentu yang dijadikan sebagai objek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka dapat berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tak punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah, serta penghuni kampung kumuh perkotaan.

Masalah kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori kemiskinan dengan pendekatan ekonomi politik. Dimana para tokoh melihat suatu permasalahan kemiskinan tidak hanya karena faktor ekonomi, namun juga terdapat faktor sosial, budaya dan konspirasi (politik). Salah satu teori kemiskinan ekonomi politik dapat dilihat dari prespektif liberal. Menurut Smith (2000), dalam prespektif liberal memandang manusia sebagai makhluk rasional, dimana kemiskinan terjadi akibat berbagai distorsi di pasar (diskriminasi, ketimpangan pendapatan, dan lain sebagainya).

Teori kemiskinan dengan prespektif liberal mengkategorikan kemiskinan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dikarenakan ketidakmampuan mencapai standar hidup minimal tertentu. Sedangkan kemiskinan relatif terjadi bila kesejahteraan berada di bawah rata-rata populasi (ada aspek distribusi). Cara untuk menanggulangnya dengan menerapkan suatu kebijakan yang mampu menghilangkan berbagai rintangan akses ke berbagai pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga standar hidup layak menjadi *affordable* dan *accessible*. Dalam hal ini pemerintah perlu memberdayakan pasar agar alokasi sumber daya efisien, dan memberikan peluang yang lebih besar bagi orang miskin untuk akses ke pasar (pasar barang, uang dan jasa). Dengan peluang yang sama, budaya kemiskinan akan hilang dengan sendirinya.

Menurut Suryawati (2005), kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu (Suryawati, 2005):

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Kemiskinan menyebabkan permasalahan sosial hadir didalam kehidupan masyarakat misalnya meningkatnya kriminal, penyakit tersebar dipemukiman kumuh, busung lapar dan lain sebagainya. Setiap negara berusaha untuk menghapus kemiskinan yang ada di dalam negaranya. Sekalipun tidak memungkinkan untuk menghilangkan kemiskinan sampai pada titik nol tetapi harapan pemerintah dan masyarakat agar kemiskinan dapat diminimalisir sampai sekecil mungkin.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar

baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Secara teknis garis kemiskinan (GK) dibangun dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM).

Ada banyak teori tentang kemiskinan, menurut Michael Sherraden (dalam Arifin, 2003) kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang saling bertentangan dan satu kelompok teori yang tidak memihak (*middle ground*), yaitu teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu (*behavioral*), teori yang mengarah pada struktur sosial, dan yang satu teori mengenai budaya miskin. Menurutnya, teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan kapital manusia (*human capital*). Teori ini disajikan dalam teori ekonomi neoklasik, yang berasumsi bahwa manusia bebas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan tersedianya pilihan-pilihan. Perspektif ini sejalan dengan teori sosiologi fungsionalis, bahwa ketidaksetaraan itu tidak dapat dihindari dan diinginkan adalah keniscayaan dan penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan.

Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan dengan menerapkan *coping strategies*. Secara umum *coping strategies* dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya (Moser, 1998). Dalam konteks keluarga miskin, menurut Moser (1998), strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola berbagai aset yang dimilikinya. Moser mengistilahkannya dengan nama *asset portfolio management*. Berdasarkan konsepsi ini, Moser (1998:4-16)

membuat kerangka analisis yang disebut *The Asset Vulnerability Framework*. Kerangka ini meliputi berbagai pengelolaan aset seperti:

- a. Aset tenaga kerja (*labour assets*), misalnya meningkatkan keterlibatan wanita dan anak-anak dalam keluarga untuk bekerja membantu ekonomi rumah tangga.
- b. Aset modal manusia (*human capital assets*), misalnya memanfaatkan status kesehatan yang dapat menentukan kapasitas orang untuk bekerja atau keterampilan dan pendidikan yang menentukan kembalian atau hasil kerja (*return*) terhadap tenaga yang dikeluarkannya.
- c. Aset produktif (*productive assets*), misalnya menggunakan rumah, sawah, ternak, tanaman untuk keperluan hidupnya.
- d. Aset relasi rumah tangga atau keluarga (*household relation assets*), misalnya memanfaatkan jaringan dan dukungan dari sistem keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga kerja dan mekanisme “uang kiriman” (*remittances*).
- e. Aset modal sosial (*social capital assets*), misalnya memanfaatkan lembaga-lembaga sosial lokal, arisan, dan pemberi kredit informal dalam proses dan sistem perekonomian keluarga.

Sebagian besar penelitian mengenai *coping strategies* menggunakan keluarga atau rumah tangga sebagai unit analisis. Meskipun istilah keluarga dan rumah tangga sering dipertukarkan, keduanya memiliki sedikit perbedaan. Keluarga menunjuk pada hubungan normatif antara orang-orang yang memiliki ikatan biologis. Sedangkan rumahtangga menunjuk pada sekumpulan orang yang hidup satu atap namun tidak selalu memiliki hubungan darah. Baik anggota keluarga maupun rumahtangga umumnya memiliki kesepakatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya secara bersama-sama.

Konsep mata pencaharian (*livelihood*) sangat penting dalam memahami *coping* strategis karena merupakan bagian dari atau bahkan kadang-kadang dianggap sama dengan strategi mata pencaharian (*livelihood strategies*). Suatu mata pencaharian meliputi pendapatan (baik yang bersifat tunai maupun barang), lembaga-lembaga sosial, relasi jender, hak-hak kepemilikan yang diperlukan guna mendukung dan menjamin kehidupan (Ellis, 1998). Chambers dan Conway

(1992) menjelaskan berbagai komponen dan interaksi antara berbagai aspek mata pencaharian yang menunjang kehidupan. Suatu kehidupan ditunjang oleh interaksi antara orang, asset nyata dan asset tidak nyata. Orang menunjuk pada kemampuan mencari nafkah (*livelihood capabilities*), asset nyata menunjuk pada simpanan (makanan, emas, tabungan) dan sumber-sumber (tanah, air, sawah, tanaman, binatang ternak), sedangkan aset tidak nyata menunjuk pada klaim dan akses yang merupakan kesempatan-kesempatan untuk menggunakan sumber, simpanan, pelayanan, informasi, barang-barang, teknologi, pekerjaan, makanan dan pendapatan (Chambers, 1995).

2.1.2.1 Kemiskinan Budaya

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangsi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori kemiskinan budaya (*cultural poverty*) yang dikemukakan Lewis (studymode.com) menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin seperti malas, mudah menyerah pada nasib dan kurang memiliki etos kerja. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan si miskin seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya. Kemiskinan ini sering disebut kemiskinan struktural.

Kemiskinan dipandang bukan karena ketidakmauan/kemalasan untuk bekerja melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana akan

dikemukakan pada pembahasan berikutnya, konsepsi kemiskinan ini juga sangat dekat dengan perspektif pekerjaan sosial yang memfokuskan pada konsep keberfungsian sosial dan senantiasa melihat manusia dalam konteks lingkungan dan situasi sosialnya.

Kemiskinan kultural, adalah budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi disebut Koentjaraningrat (2005:40) dengan mentalitas atau kebudayaan kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Seperti, masyarakat yang pasrah dengan keadaannya dan menganggap bahwa mereka miskin karena turunan, atau karena dulu orang tuanya atau nenek moyangnya juga miskin, sehingga usahanya untuk maju menjadi kurang. Semakin banyak program-program yang bergerak dalam penanggulangan kemiskinan, namun makin banyak pula jumlah orang miskin. Berbicara tentang kemiskinan kultural, bahwa budayalah yang membuat orang miskin. Koentjaraningrat (2005:45) menyatakan sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari suatu adat-istiadat. Hal tersebut terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, sehingga nilai budaya tersebut merupakan hal-hal yang harus dianggap amat bernilai dalam hidup. Oleh karena itu sistem nilai budaya umumnya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Lebih lanjut koentjaraningrat mengartikan sikap mental sebagai suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya, baik lingkungan manusia, alam maupun fisik.

Sementara itu, Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (2005:50) menyatakan bahwa sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia menyangkut lima masalah dasar dalam kehidupan manusia, yaitu: menyangkut hakekat hidup manusia, hakekat karya manusia, hakekat waktu, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kelima masalah pokok tersebut memiliki orientasi nilai budaya yang masing-masing “melahirkan” suatu sikap mental. Sikap mental tersebut bisa sejalan atau tidak sejalan dengan upaya peningkatan taraf hidup warga miskin.

2.1.2.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

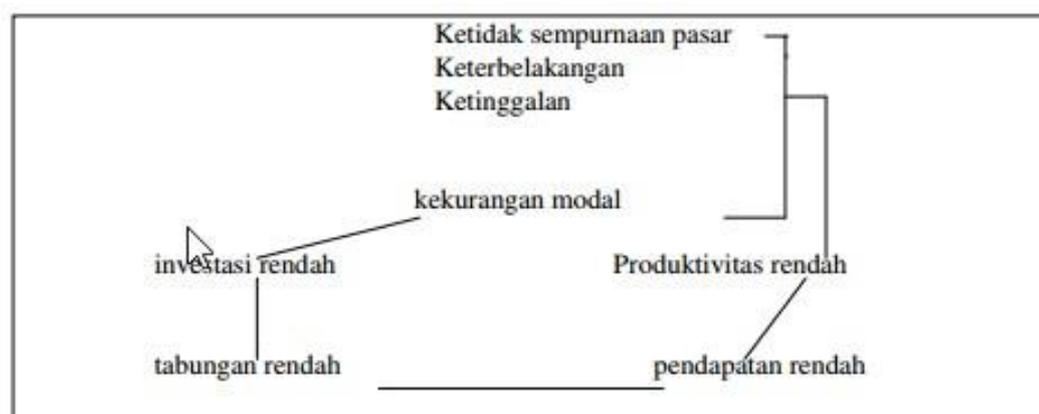
Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan dari kondisistruktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan (Soetandyo, 2000). Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor- faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan (Suyanto, 2000). Padahal indikator kemiskinan tersebut seharusnya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan rendah dan produktivitas yang rendah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada. Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait mengkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Oleh karena itu mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-faktor yang berada dibalik kemiskinan tersebut.

Todaro (2000) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja,

rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita.

Kuncoro (2000:131) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Kuncoro (2000:132) adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.



Sumber: Kuncoro, 2000.

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkarulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

Menurut Raharjo (2002) dalam kesimpulannya tentang penyebab kemiskinan di Indonesia, menyebutkan ada tujuh faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, yaitu:

- a. Kemiskinan disebabkan oleh kesempatan kerja (miskin karena menganggur atau tidak mempunyai kesempatan kerja).
- b. Upah gaji dibawah standar minimum.
- c. Produktiitas kerja yang rendah.
- d. Ketiadaan aset (misalnya petani miskin karena tidak memiliki lahan, dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah lahan).
- e. Diskriminasi, misalnya diskriminasi karena jenis kelamin dan kelas sosial masyarakat.
- f. Tekanan harga (biasanya berlangsung pada petani kecil atau pengrajin dalam industri rumah tangga.
- g. Penjualan tanah (tanah yang potensi untuk masa depan kehidupan keluarga telah habis dijual).

2.1.3 Hubungan Kemiskinan dan Petani

Potensi sektor pertanian di Kabupaten Situbondo yang memberikan kontribusi terbesar diantaranya adalah produksi dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, tambak, peternakan dan kehutanan. Penelitian ini meneliti petani tanaman pangan. Produksi pertanian tanaman pangan diantaranya adalah padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan utamanya mangga dan sayur-sayuran.

Petani adalah seseorang yang mempunyai profesi bercocok tanam (menanam tumbuh-tumbuhan) dengan maksud tumbuh-tumbuhan dapat berkembang biak menjadi lebih banyak serta untuk dipungut hasilnya, tujuan menanam tumbuh-tumbuhan untuk memebuhi kebutuhan hidup yaitu dapat dimakan manusia dan hewan peliharaannya (Salim dan Kahono, 2001). Sedangkan masyarakat petani identik dengan masyarakat yang bermukim di daerah pedesaan yang mengelola usaha pertanian dan merupakan mata pencahariannya sebagai petani masih tergolong sederhana (Salim dan Kahono, 2001). Adapun pekerjaan lain yang dilakukan adalah pekerjaan sampingan seperti tukang kayu, pedagang, pengrajin, dan lain sebagainya.

Pengertian petani miskin adalah tenaga kerja upahan yang apabila ditinjau dari aspek ekonomi dicirikan salah satunya berpendapatan rendah termasuk usaha di luar usaha tani, petani miskin tingkat pendapatan perkapita per tahun kurang dari 320 kg atau setara dengan kebutuhan beras untuk daerah pedesaan (Salim dan Kahono, 2001). Ciri khas petani miskin tidak berdiri sendiri namun berkaitan erat satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi. Penyebab pendapatan petani miskin rendah karena produksi mereka juga rendah. Pproduksi yang rendah disebabkan lahan usaha tani yang sempit dan dikelola dengan cara sederhana serta peralatan yang terbatas. Kendala lain adalah jika lahan garapan adalah milik orang lain, sehingga mereka harus membayar uang sewa atau bagi hasil dengan beban penggarap menanggung semua biaya pupuk, bibit dan pengolahan hingga masa panen (Salim dan Kahono, 2001). Apabila petani mengalami gagal panen karena faktor cuaca atau alam, tentu saja akan semakin memperpuruk kemiskinan petani.

Menurut Salim dan Kahono (2001), petani sawah adalah seseorang yang mempunyai profesi bercocok tanam di sawah dengan maksud tanaman dapat berkembang biak menjadi lebih banyak serta mempengaruhi hasilnya. Tujuan menanam adalah agar hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya pengertian petani sawah berkembang menjadi seseorang yang bergerak di bidang bisnis lahan basah, utamanya terhadap cara melakukan pengelolaan tanah terhadap tujuan untuk

menumbuhkan dan memelihara padi, dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau dijual kepada orang lain (Salim dan Kahono, 2001).

Menurut Harniati (2007), fenomena kemiskinan pedesaan dan pertanian di Indonesia menunjukkan kaitan antara faktor spasial dan sektor usaha mayoritas penduduknya. Terdapat hubungan erat antara kerentanan penduduk terhadap kemiskinan dengan ekosistem dimana ia tinggal. Sehingga tingkat kemiskinan berbeda antar agroekosistem. Dimana tingkat kemiskinan penduduk di agroekosistem dataran tinggi, lahan basah dan lahan kering serta pantai/pesisir di bawah angka kemiskinan nasional. Namun jumlah rumah tangga miskin di lahan kering dan di dataran tinggi jauh lebih besar dari pada di lahan basah dan di pesisir. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi mengutamakan pola umum (*one fits for all*) tetapi perlu mengembangkan berbagai model yang sesuai spesifik karakteristik kemiskinan di berbagai agroekosistem.

Berdasarkan data BPS 2012 sekitar 66% masyarakat miskin Indonesia berada di pedesaan dan sekitar 56% menggantungkan hidupnya dari pertanian. Dari seluruh penduduk miskin pedesaan ternyata sekitar 90% bekerja, yang berarti mereka bekerja keras namun tetap miskin. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik termasuk yang terutama adalah tanah.

Menurut James C. Scott (wikipedia.com), masyarakat pertanian dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Golongan pertama, petani pemilik tanah pertanian dan pekarangan rumah.
- b. Golongan kedua, petani yang memiliki tanah pekarangan beserta tanah tetapi tidak memiliki tanah pertanian.
- c. Golongan ketiga, petani yang tidak memiliki tanah pertanian dan rumah untuk pekarangan

Masih menurut James C. Scott bahwa masyarakat pertanian memiliki sifat sistem pelapisan sosial sebagai berikut:

- a. Bersifat homogen, artinya memiliki tingkat pendidikan, pendapatan, perilaku gaya hidup, serta hak dan kewajiban yang sama.
- b. Dibentuk oleh nilai-nilai norma sosial seperti solidaritas, kekeluargaan, gotong royong dan lainnya.
- c. Mengenal sistem pertanian tradisional.
- d. Umumnya kurang memahami nilai-nilai ekonomis hasil pertanian mereka sehingga usaha yang bersifat materiaristis jarang terjadi.

Menurut klasifikasi Sajogyo (2002:37), petani miskin dikelompokkan ke dalam enam golongan:

- a. Paling miskin, jika pengeluaran per anggota keluarga adalah 180 kg setara beras/tahun.
- b. Miskin sekali, jika pengeluaran per anggota keluarga adalah 180 – 240 kg setara beras/tahun.
- c. Miskin, jika pengeluaran per anggota keluarga adalah 240 – 320 kg setara beras/tahun.
- d. Nyaris miskin, jika pengeluaran per anggota keluarga adalah 320 – 480 kg setara beras/tahun.
- e. Cukup, jika pengeluaran per anggota keluarga adalah 480 – 960 kg setara beras/tahun.
- f. Hidup layak, jika pengeluaran per anggota keluarga adalah > 980 kg setara beras/tahun.

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan serta mensejahterakan kualitas hidup petani. Dalam usaha tersebut diperlukan adanya partisipasi petani dan masyarakat, sehingga peningkatan produksi komoditas pertanian dapat dicapai lebih efisien dan dinamis dengan diikuti pembagian surplus ekonomi antar pelaku secara adil. Harniati (2007) mengidentifikasi bahwa strategi pembangunan pertanian merupakan peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (*human capital*) masyarakat pertanian, meningkatkan penguasaan aset produktif pertanian, inovasi

baru dan menata kembali kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan pengembangan kelembagaan pertanian dalam arti luas.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah produktivitas tenaga kerja dan penguasaan aset produktif yang rendah disertai adanya dualisme antara pertanian rakyat yang tradisional dan perusahaan besar yang maju dan modern serta dualisme antara kota dan desa. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan.

2.1.4 Batas Kemiskinan

Biro Pusat Statistik (2009) menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran komoditas pangan dan non pangan. Komoditas pangan terpilih terdiri dari 52 macam, sedangkan komoditas non pangan terdiri dari 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. Indikator BPS garis kemiskinan yang diterapkan yaitu keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp. 150.000 – Rp. 180.000 per bulan. Dalam penanggulangan masalah kemiskinan pemerintah Indonesia melalui program bantuan langsung tunai (BLT) melalui BPS telah menetapkan 14 kriteria keluarga miskin sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau menggunakan WC umum bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.

- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala keluarga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, perak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Penelitian ini lebih berfokus pada tingkat kemiskinan berdasarkan pada indikator kemiskinan dari BPS. Hal ini dikarenakan indikator kemiskinan dari BPS adalah indikator yang digunakan pemerintah Indonesia dalam menentukan standar masyarakat miskin yang berhak memperoleh dana BLT.

BKKBN (2011) menerapkan ukuran kemiskinan dengan pendekatan kesejahteraan. Keluarga dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III plus. Keluarga miskin dimasukkan dalam kategori prasejahtera dan sejahtera I. Keluarga yang dimasukkan dalam kategori prasejahtera apabila tidak dapat memenuhi satu dari lima syarat berikut:

- a. Melaksanakan ibadah menurut agamanya.
- b. Makan 2 kali sehari atau lebih.
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
- d. Lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Batasan kemiskinan lain menurut *World Bank* (2008), menetapkan standar kemiskinan sebesar \$ 1 per hari untuk kategori sangat miskin dan \$ 2 per hari untuk kategori miskin, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- c. Pembangunan kota yang bias.

- d. Perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat.
- e. Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi.
- f. Rendahnya produktivitas.
- g. Budaya hidup yang jelek.
- h. Tata pemerintahan yang buruk.
- i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disingkat TNP2K (2012) menyatakan bahwa batas kemiskinan adalah Rp. 248.707 per kapita. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). TNP2K memandang kemiskinan sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar makanan dan bukan makanan.

Di Indonesia terdapat beberapa model penghitungan kemiskinan, yaitu:

- a. Model tingkat konsumsi.

Sajogyo (2002) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Beliau membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun. Hampir sejalan dengan model konsumsi beras dari Sajogyo, BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah BPS tidak menyertakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi pada tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan.

- b. Model kesejahteraan keluarga

Berbeda dengan BPS, BKKBN lebih melihat dari segi kesejahteraan dibanding sisi kemiskinan. Uji survey pada BPS mengukur kelayakan rumah tinggal, sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi Keluarga Berencana (KB), yaitu keluarga yang berkualitas. Pembangunan dan

pengentasan kemiskinan terdapat pada empat kelompok data yang diukur dari pendapatan keluarga yaitu data demografi misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dan lain-lain. Data keluarga berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB, data tahap keluarga sejahtera yang dibagi menjadi:

1. Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:
 - a) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
 - b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - c) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, beker, sekolah atau bepergian.
 - d) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
 - e) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke petugas kesehatan.
3. Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah memenuhi kriteria Keluarga Sejahtera I harus memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu:
 - a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
 - b) Paling kurang seminggu sekali keluarga menyediakan daging, ikan atau telur sebagai lauk pauk.
 - c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
 - d) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
 - e) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
 - f) Paling kurang 1 orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.

- g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
 - h) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
 - i) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).
4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu:
- a) Mmempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 - b) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
 - c) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
 - d) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
 - e) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali per enam bulan.
 - f) Dapat memperoleh berita dari surat kabar, TV atau majalah.
 - g) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
5. Keluarga Sejahtera III plus, keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:
- a) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
 - b) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat.

Dari 5 kategori tersebut, yang dikatakan keluarga miskin sekali dan keluarga miskin adalah tahap Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

c. Model pembangunan manusia

Pendekatan Pembangunan Manusia dipromosikan oleh PBB untuk program pembangunan yaitu UNDP. Laporan tentang Pembangunan Manusia atau yang sering disebut HDR (*Human Development Report*). Pemerintah

Indonesia melalui BPS dan Bappenas mengembangkan model ini. GBHN telah menjadikan model ini sebagai model pembangunan nasional yang disebut sebagai Pembangunan Manusia Seutuhnya. HRD berisikan penjelasan tentang empat indeks yaitu indeks pembangunan manusia atau HDI, indeks pembangunan gender atau GDI, langkah pemberdayaan gender atau GEM dan indeks kemiskinan manusia atau HPI. Pengukuran angka kemiskinan dilakukan dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengukur pencapaian suatu wilayah dalam tiga dimensi pembangunan manusia yang paling esensial seperti lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Indeks tersebut dihitung dengan angka harapan hidup, angka *melek* huruf, dan rata-rata lama sekolah dan penduduk yang kekurangan makan.

b. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

Mengukur dimensi yang berlawanan arah dari IPM yaitu seberapa besar penduduk yang kurang beruntung, tertinggal karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Indeks tersebut dihitung menggunakan persentase penduduk buta huruf, penduduk yang tidak mencapai usia 40 tahun, balita dengan statur gizi kurang, penduduk yang tidak mempunyai akses pada pelayanan kesehatan dasar dan sanitasi air bersih. Semakin besar penduduk suatu wilayah pada situasi ini dipresentasikan oleh IKM yang semakin tinggi.

c. Indeks Kehidupan Fakir Miskin

Mengukur kesenjangan pencapaian, yaitu berapa upaya dalam persentase yang masih harus dilakukan/dicapai untuk membawa kondisi kehidupan fakir miskin di suatu wilayah menuju standar kehidupan minimum yang layak. Dimensi yang diukur mencakup situasi kelaparan atau sangat kurang kalori, kualitas hidup fakir miskin, serta akses fakir miskin pada pelayanan sosial dasar dan pembangunan.

2.1.5 Kebijakan Pertanian

Kebijakan pertanian adalah salah satu dari kegiatan untuk masyarakat (*public action*) yang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup secara umum melalui perbaikan kesempatan ekonomi bagi para petani dan pengembangan struktur progresif dalam kehidupan masyarakat, termasuk rekayasa sistem kelembagaan yang diperlukan sebagai pendukung (Sajogyo, 2002). Merumuskan suatu kebijakan untuk pembangunan pertanian berarti menentukan strategi untuk mengkondisikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pertanian agar dapat mencapai keadaan yang diinginkan. Upaya mencapai keadaan yang diinginkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Sajogyo, 2002):

- a. Secara teknis dapat dilaksanakan, artinya teknologi, alat dan keterampilan yang ada dapat dan memadai untuk menjalankan strategi tersebut.
- b. Secara ekonomi menguntungkan, artinya penerapan strategi ini secara finansial memberikan *net benefit* pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- c. Secara sosiologis dapat dipertanggungjawabkan, artinya penerapan strategi ini tidak membuat komunitas masyarakat menjadi terganggu keseimbangan harmoninya.
- d. Secara ekologis berkelanjutan, artinya penerapan strategi ini ramah lingkungan dan tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem keseimbangan lingkungan alami.

Secara garis besar kebijakan pertanian memberikan fokus penekanan pada tiga bidang utama yaitu (Sajogyo, 2002):

- a. Usaha tani yaitu bidang kebijakan yang didasarkan pada kenyataan bahwa pertanian adalah usaha keluarga dan karena itu pembangunan pertanian tidak bisa terlepas dari pembangunan keluarga petani secara utuh.
- b. *Price parity* (pasangan harga) yaitu bidang kebijakan yang diarahkan untuk memperoleh tingkat harga wajar bagi produk pertanian relatif terhadap produk-produk sektor lainnya dalam perekonomian.
- c. *Bargaining position* (posisi tawar) yaitu bidang kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu memperkuat posisi petani sehingga mereka dapat memperoleh insentif yang layak untuk usaha yang mereka jalankan.

Menurut orientasinya kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu (Koentjaraningrat, 2005):

- a. Kebijakan pengembangan (*development policy*)
- b. Kebijakan kompensasi (*compensating policy*)

Berikut ini beberapa contoh kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan pertanian untuk pengentasan kemiskinan. Semua kebijakan yang dicontohkan merupakan kebijakan yang bersifat makro, antara lain (Koentjaraningrat, 2005):

- a. Kebijakan harga dan pendapatan (*price and income policy*), merupakan salah satu kebijakan yang dari segi harga bertujuan untuk mengadakan stabilisasi harga, sedangkan dari segi pendapatan bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian suatu penyangga (*support*) untuk hasil-hasil pertanian supaya petani tidak merugi atau sejumlah subsidi tertentu terhadap petani. Secara teoritis kebijakan harga dapat dipakai untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
 1. Stabilisasi harga hasil pertanian terutama pada tingkat petani.
 2. Meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan nilai tukar (*term of trade*)
 3. Memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi.

Kebijakan harga dalam pertanian baik menyangkut produk pertanian maupun sarana produksi. Sehingga kebijakan harga menyangkut masalah pemerintah mengatur dan menetapkan kebijaksanaan harga dasar dan harga tertinggi pada komoditi seperti padi atau palawija, bagaimana menetapkan kebijaksanaan harga produk, harga atau penguatan atas air irigasi, dan lainnya.

- b. Kebijakan pemasaran, penekanannya pada perubahan rantai pemasaran dari produsen ke konsumen dengan tujuan memperkuat daya saing petani. Badan-badan pemasaran yang dibentuk pemerintah dimaksudkan untuk memberikan jaminan harga yang minimum dan stabil kepada petani. Sehubungan dengan usaha memperkuat kedudukan pengusaha eksportir lemah telah diambil kebijakan kredit, yaitu dengan memberikan kredit berbunga relatif rendah dan menyederhanakan prosedur ekspor, maka kebijakan pemasaran hasil tanaman

perdagangan untuk ekspor meliputi pengaturan distribusi sarana-sarana produksi bagi petani. Pemerintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat di antara para pedagang yang melayani kebutuhan petani seperti pupuk, pestisida, dan lainnya sehingga petani dapat membeli sarana-sarana produksi tersebut dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

- c. Kebijakan struktural, dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi seperti luas pemilikan tanah, pengenalan dan penguasaan alat-alat pertanian yang baru, serta perbaikan prasarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi. Perubahan struktur tidak mudah dicapai dan biasanya memerlukan waktu yang lama. Hal ini karena sifat fisik usaha tani yang merupakan unit usaha ekonomi dan bagian dari kehidupan petani disegala aspek. Tindakan ekonomi saja tidak mampu mendorong perubahan struktur dalam sektor pertanian.
- d. Kebijakan IDT (Inpres Desa Tertinggal), diperlukan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa tertinggal. IDT diperlukan untuk mensukseskan program pemerataan karena IDT dapat memobilisasi kemampuan masyarakat kecil secara lebih besar sehingga masyarakat dapat mampu meningkatkan wawasan, kebersamaan dan partisipasinya terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Ada 4 tujuan IDT, yaitu:
 1. Memadukan gerak langkah semua instansi, lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
 2. Membuka peluang bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan produktif dengan bantuan modal kerja.
 3. Mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi penduduk miskin melalui penyedia dana bantuan.
 4. Meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan, harga diri dan percaya diri dari penduduk miskin di masyarakat. Dengan ini sumber daya manusia dan sumber daya alam diharapkan akan mencapai suatu pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (*comprehensif*), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan. Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.

Memberdayakan masyarakat mengandung makna melindungi (kata kuncinya adalah perlindungan kepada masyarakat). Dalam proses pemberdayaan masyarakat harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat lemah atau miskin amat mendasar sifatnya, karena melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup dari interaksi, karena hal itu akan mengkerdikan dan melunglaikan masyarakat yang lemah. Dalam konsep pembangunan, pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat bukan sebagai pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat akan lebih mengutamakan empat faktor penting yakni pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*), partisipasi masyarakat (*people participation*), organisasi masyarakat (*community organization*), dan pemimpin yang bijaksana (*leadership*). Faktor-faktor tersebut diatas dimaksudkan untuk memadukan dan menentukan arah kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan anatara lain meliputi (Koentjaraningrat, 2005):

- a. Kebijakan yang tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

2.1.6 Kelemahan Program Pengentasan Kemiskinan Petani

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Di Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah besar yang ditunggu penyelesaiannya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun tetap saja tingkat kemiskinan masih tinggi. Perlu adanya evaluasi program pengentasan kemiskinan agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan program pengentasan kemiskinan sehingga tidak berjalan secara efisien. Kelemahan program kemiskinan tersebut, yaitu (Salim dan Kahono, 2001):

- a. Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan.
- b. Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi.
- c. Lebih bersifat karitatif daripada transformatif.
- d. Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek.
- e. Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada *charity* dari pada *productivity*.
- f. Asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK, 2003) beberapa kelemahan upaya penanggulangan kemiskinan yang berjalan selama ini antara lain:

- a. Program-program penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial, belum terpadu dan komprehensif.
- b. Belum tersedianya instrumen upaya penanggulangan kemiskinan yang spesifik sesuai dengan keragaman dimensi permasalahan kemiskinan di setiap daerah.
- c. Berbagai kebijakan yang semula diproyeksikan untuk mengatasi masalah kemiskinan pada kenyataannya melahirkan masalah baru, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.
- d. Lemahnya birokrasi pemerintah, kecilnya peran masyarakat, LSM, tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, terhambatnya komunikasi pembuat program dengan *stakeholders*.

Selain itu, kesalahan analisis atau pentargetan sebagaimana terjadi dalam program-program ini menyebabkan banyak keluarga miskin gagal menikmati manfaat program-program tersebut. Ada banyak alasan mengapa terjadi pentargetan yang buruk, seperti sistem data dan informasi yang tidak tepat, kurangnya waktu untuk analisis mikro dan persiapan program, serta terlalu banyak program yang menggunakan pendekatan pentargetan berdasarkan wilayah. Sebagian besar aspek sosialisasi dan pelaksanaan adalah kurang memadai karena berbagai sebab.

Kegagalan penanganan kemiskinan petani selama ini, disamping kurangnya keterpaduan, juga terdapatnya berbagai kelemahan dalam perencanaan. Untuk itu dalam proses perencanaan harus unsur-unsur sebagai berikut (Salim dan Kahono, 2001):

- a. Perumusan sasaran yang jelas, berupa hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta objek dari kegiatan.
- b. Pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang objek yang akan ditangani. Selanjutnya akan memudahkan dalam menyusun berbagai strategi yang mendukung penanganan kemiskinan petani.
- c. Penentuan tujuan harus bersifat spesifik (objek, kegiatan, dibatasi waktu dan terukur), sehingga pengentasan kemiskinan petani jelas siapa sasarannya dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan dengan jelas.
- d. Menganalisa keadaan, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada di lapangan, dan apabila terjadi permasalahan diluar dugaan, maka perlu segera dibuatkan strategi dan tindakan baru untuk menutup jurang perbedaan.
- e. Pendampingan, *monitoring* dan evaluasi, pendampingan harus dilakukan awal kegiatan dilaksanakan, sampai paca kegiatan, sehingga akan menjadi bahan evaluasi, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Agar program pengentasan kemiskinan tidak mengalami kegagalan, perlu adanya efektifitas program seperti (Kartasasmita, 1996):

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat *top-down* menjadi partisipatif, dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal.
- b. Program yang dijalankan lebih dominan bersifat politis dibandingkan aspek strategis dan ekonomis. Pada kenyataannya banyak terjadi program-program yang telah dirancang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Penentuan lokasi dan penerima manfaat program lebih ditentukan oleh kedekatan spesial kelompok-kelompok tertentu dengan birokrasi maupun legislatif. Kondisi ini tentunya sangat sulit untuk menilai efektifitas program yang dilakukan dari aspek strategis dan ekonominya. Dan tentunya mengakibatkan kecemburuan sosial.
- c. Sinergi dan ego sektoral. Pembangunan di sektor pertanian selama ini masih belum menunjukkan adanya sinergisitas antar seluruh stakeholder. Sinergi antarbidang pembangunan sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan dan tercapainya secara efektif dan efisien berbagai sasaran pembangunan. Demikian pula dengan adanya indikasi ego sektoral di dalam suatu pengelolaan pembangunan. Konkretnya, program-program pertanian yang dilakukan harus ditunjang oleh semua sektor terkait. Perencanaan pembangunan ke depan semestinya mengakomodasi konsep pemberdayaan dan partisipatif petani sebagai subyek dari kemiskinan itu sendiri.
- d. Kebijakan pertanian secara formal dinyatakan berlaku dan bisa dipaksakan, tetapi pada tahap pelaksanaan bisa kehilangan kekuasaan otonominya apabila kondisi dan karakter sosial orang-orang yang terlibat pengentasan kemiskinan petani tidak diperhitungkan secara matang. Pada dimensi ini penting ada analisis sosial, politik, psikologis, dan ekonomis terhadap para politisi, pengusaha, birokrat, dan respons masyarakat lain (di luar petani), agar diketahui dan bisa dibangkitkan komitmennya terhadap program pengentasan kemiskinan petani tersebut. Pengentasan kemiskinan bukanlah pekerjaan instan melainkan perlu kerja keras, kebersamaan, dan keterpaduan segenap komponen bangsa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Prastyo (2010) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”, menggunakan metode panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Menganalisis perbedaan kondisi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penggunaan *dummy* wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hipotesis dalam penelitian ini ada 4 yaitu:

- a. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007.
- b. Diduga variabel upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007.
- c. Diduga variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007.
- d. Diduga variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Oleh karenanya perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Rejekiingsih (2011) dengan judul penelitian ”Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural” bertujuan mendeskripsikan dan mengidentifikasi karakteristik masyarakat miskin di kota Semarang. Sampel yang dipilih adalah masyarakat miskin di empat kelurahan di kota Semarang, yaitu: Kelurahan Bubakan, Kelurahan Krobokan, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Tandang. Kajian kemiskinan dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan dimensi kultural. Dari hasil penelitian diketahui

bahwa karakteristik warga miskin di kota Semarang antara lain kepala rumah tangga sebagian besar berpendidikan rendah (tamat SD), bekerja sebagai buruh, dan mempunyai tanggungan tiga jiwa. Selain itu diketahui bahwa terjadi adanya ketidakmerataan dalam distribusi bantuan kepada warga miskin. Terkait dengan analisis dari dimensi kultural diketahui bahwa warga miskin di kota Semarang memiliki orientasi nilai budaya dan sikap mental yang positif dalam memandang hakekat hidup, hakekat karya, hakekat waktu, hakekat hubungan dengan alam semesta dan sesama manusia.

Penelitian oleh Medah dkk (2012) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Petani (Suatu kasus di Kecamatan Kupang Timur - Kabupaten Kupang)”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 160 orang petani. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan:

- a. Karakteristik petani miskin di Kecamatan Kupang Timur terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan sebanyak 62,50 persen, 66 persen petani memiliki modal yang rendah.
- b. Penggunaan teknologi pertanian yang semi tradisional 65.63 persen, sementara 91 persen petani belum menggunakan akses kredit, curahan waktu kerja di sektor pertanian berkisar antara 5-8 jam/hari sebanyak 73,75 persen dan 43.75 persen petani cukup sering mengadakan lima kali pesta dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- c. Faktor-faktor penyebab kemiskinan petani di Kecamatan Kupang Timur yaitu faktor geografi dan lingkungan mempengaruhi kemiskinan sebesar 82,5 persen, diikuti faktor ekonomi sebesar 5,1 persen serta faktor sosial dan budaya mempengaruhi kemiskinan sebesar 3,2 persen serta pendapatan mempengaruhi kemiskinan petani sebesar 34.4 persen.

Sari, dkk (2013) yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Buleleng”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi perkecamatan di Kabupaten Buleleng, mengetahui ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Buleleng dan menguji hipotesis Kuznets tentang U terbalik di Kabupaten Buleleng. Teknik analisis yang digunakan adalah tipologi kelas, indeks Williamson dan korelasi Pearson. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Ketimpangan antar daerah dapat memberikan dampak yang buruk bagi daerah-daerah pada suatu wilayah. Hasil penelitian menunjukkan hasil tipologi kelas hanya terbagi menjadi dua kuadran dan perhitungan indeks Williamson angkanya cukup kecil dan dari hasil analisis yang telah dilakukan hipotesis Kuznets tentang U terbalik tidak berlaku di Kabupaten Buleleng selama periode pengamatan.

Penelitian oleh Rusdarti & Sebayang (2013) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik terhadap kemiskinan. Analisis yang digunakan analisis data menggunakan teknik *Ordinary Least Square* (OLS). PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah artinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|
| 1. | Adit Agus Prastyo (2010), "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". | Metode panel data dengan pendekatan efek tetap (<i>fixed effect model</i>), jenis data sekunder, dan <i>dummy</i> wilayah. | <ul style="list-style-type: none"> a. Variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. b. Perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. |
| 2. | Tri Wahyu Rejekiingsih (2011), "Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural". | Penelitian kualitatif dimana kajian kemiskinan dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan dimensi kultural | <ul style="list-style-type: none"> a. Karakteristik warga miskin di Kota Semarang: kepala rumah tangga berpendidikan rendah (tamat SD), bekerja sebagai buruh dan mempunyai tanggungan tiga jiwa. b. Terjadi adanya ketidakmerataan distribusi bantuan kepada warga miskin. c. Analisis dimensi kultural warga miskin di Kota Semarang memiliki nilai budaya dan sikap mental yang positif dalam hakekat hidup, karya, waktu, hubungan dengan alam semesta dan sesama manusia. |
| 3. | Melgiana S. Medah, Maman H. Karmana, Lies Sulistyowati (2012), "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Petani (Suatu Kasus di Kecamatan Kupang Timur - Kabupaten Kupang)". | Metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. | <ul style="list-style-type: none"> a. Karakteristik petani miskin terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan sebanyak 62,50%, 66% petani memiliki modal yang rendah. b. Penggunaan teknologi pertanian yang semi tradisional 65.63%, 91% petani belum menggunakan akses kredit, curahan waktu kerja di sektor pertanian berkisar antara 5-8 jam/hari sebanyak 73,75%. c. Faktor-faktor penyebab kemiskinan petani yaitu faktor geografi dan lingkungan mempengaruhi kemiskinan sebesar 82,5%, diikuti faktor ekonomi sebesar 5,1%, faktor sosial dan budaya sebesar 3,2% serta pendapatan sebesar 34.4%. |

| No | Nama/Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|
| 4. | Puput D.K. Sari, dan Made K.S. Budhi (2013), "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Buleleng". | Teknik analisis yang digunakan adalah tipologi kelas, indeks Williamson dan korelasi Pearson. | a. Hasil tipologi kelas hanya terbagi menjadi dua kuadran. b. Perhitungan indeks Williamson angkanya cukup kecil dan dari hasil analisis yang telah dilakukan hipotesis Kuznets tentang U terbalik tidak berlaku di Kabupaten Buleleng selama periode pengamatan. |
| 5. | Rusdarti & Lesta Karolina Sebayang (2013), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". | Analisis data menggunakan teknik <i>Ordinary Least Square</i> (OLS). | Penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan. |

Sumber: Data diolah (2014).

Penelitian saat ini berjudul "Analisa Kemiskinan Petani di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo" yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang dominan menentukan kemiskinan petani berdasarkan dimensi kultural di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sehingga dapat diramalkan penurunan tingkat kemiskinan di masa yang akan datang. Metode analisis kualitatif yang dikuantitatifkan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Secara terperinci *research gap* pada penelitian ini adalah penggunaan variabel karakteristik wilayah, struktur ekonomi dan sosial, sarana dan prasarana, SDM, serta kearifan lokal/budaya untuk mengetahui gambaran kemiskinan dari aspek kultural di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini penting, karena *output* dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi untuk pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menanggulangi masalah kemiskinan petani di Kabupaten Situbondo. Hal yang menjadikan penelitian ini spesial karena dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk mengembangkan

metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penggabungan analisis deskriptif dan analisis faktor menjadikan hasil pengolahan data lebih kompleks.

2.3 Kerangka Konseptual

Tingkat kesejahteraan (*welfare*) adalah merupakan konsep yang digunakan untuk menyatakan kualitas hidup suatu masyarakat atau individu di suatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu. Kesejahteraan itu bersifat luas yang dapat diterapkan pada skala sosial besar dan kecil misalnya keluarga dan individu (Yosef dalam Maharani, 2006). Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang dimiliki bersifat relatif, tergantung bagaimana penilaian masing-masing individu terhadap kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera bagi seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum tentu dapat juga dikatakan sejahtera bagi orang lain.

Indikator kesejahteraan rakyat menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat Indonesia antar waktu, perkembangannya antar waktu serta perbandingannya antar propinsi dan daerah tempat tinggal. Dalam mengembangkan indikator kesejahteraan rakyat tidak hanya menyajikan indikator dampak (*output indicators*) untuk menunjukkan hasil upaya pembangunan, tetapi juga menyajikan indikator proses (*process indicators*). Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu (Maharani, 2006).

Derifikasi dari sebuah kesejahteraan adalah kemiskinan ketika seorang dikelompokkan belum masuk kategori sejahtera. Oleh karena itu persoalan kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat klasik. Fakta kemiskinan baik menyangkut individu maupun masyarakat akan mudah dilihat, walaupun baru sekedar persepsi atau penilaian kualitatif. Kemiskinan dari sisi ekonomi dan waktu sangat berfluktuasi dan sangat rentan terhadap gejolak ekonomi makro, guncangan politik, dan sebab lain. Walaupun jumlah penduduk miskin di suatu waktu menurun, pada sebagian orang hanya sesaat saja dan akan kembali miskin apabila ada guncangan.

Persebaran dari kemiskinan yang terjadi pada suatu kawasan bisa membentuk suatu pola karakteristik dari persebaran kemiskinan yang sering

disebut dengan kantong kemiskinan. Salah satu fenomena yang muncul adalah semakin jauh suatu tempat dari titik pertumbuhan (*growth centre*) akan semakin tingkat kemiskinan penghuninya. Penelitian ini berfokus pada titik pertumbuhan yang berlokasi di daerah pedesaan (*rural area*), dimana secara relatif daerah pedesaan lebih miskin dari daerah perkotaan. Lebih spesifik lagi, yang dimaksud dengan daerah pedesaan di sini adalah daerah yang basis perekonomiannya dari sektor pertanian.

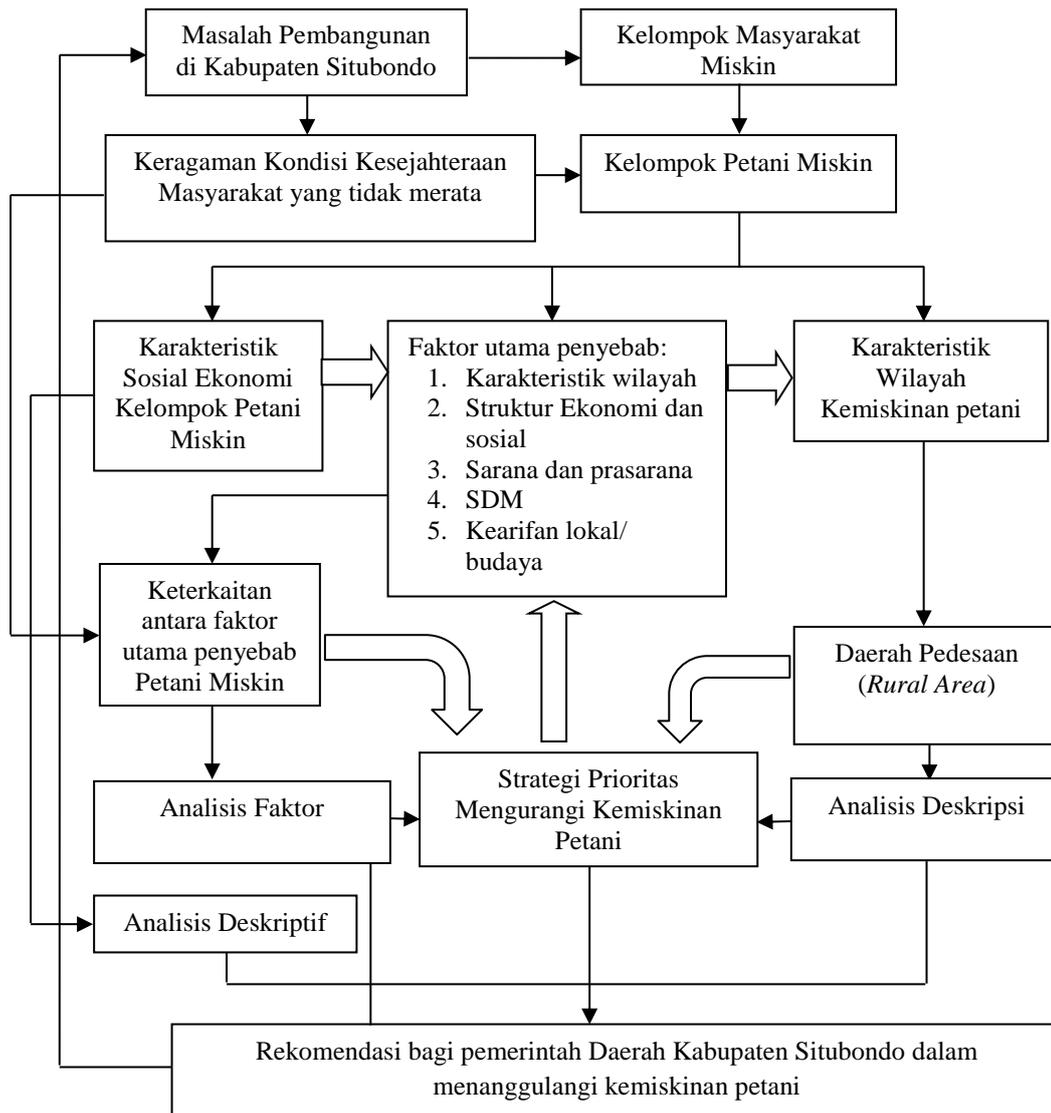
Secara empiris terdapat dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo diharapkan mampu membuat suatu kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan petani yang terjadi. Kebijakan di sini diharapkan menjawab harapan dari masyarakat khususnya mereka yang masuk dalam kategori petani miskin. Berdasarkan secara teoritis maupun empiris telah menjelaskan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab dari munculnya kemiskinan masyarakat, dengan masing-masing karakteristik dari persebaran kemiskinan yang terjadi antar wilayah yang tidak sama, maka

sewajarnya pemerintah yang berwenang mampu menetapkan suatu kebijakan penanganan kemiskinan dengan mulai mempertimbangkan karakteristik dari tiap kemiskinan yang terjadi.

Sebagai suatu pemahaman dalam mengkonstruksi antara permasalahan yang terjadi dengan proses metodologi ilmiah maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami prinsip-prinsip umum yang mendasari fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian, fenomena tersebut merupakan dinamika kehidupan masyarakat miskin yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil secara *purposive* di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Pertimbangan pemilihan Kecamatan Kapongan dalam sensus pertanian Kabupaten Situbondo tahun 2013 merupakan kecamatan yang mempunyai 9.161 rumah tangga tani. Karakteristik petani dapat mewakili petani tanaman pangan di seluruh Kabupaten Situbondo. Petani sebagai obyek penelitian karena sebagai bagian golongan masyarakat bawah yang identik dengan kemiskinan (Sajogyo, 2002).

Kecamatan Kapongan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang terletak di bagian timur. Luas wilayah Kecamatan Kapongan adalah 4.455 Ha yang sebagian merupakan tanah datar dengan ketinggian 0 – 35 m dari permukaan laut. Potensi sektor pertanian Kecamatan Kapongan memberikan kontribusi besar bagi sektor pertanian Kabupaten Situbondo, diantaranya pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, tambak dan peternakan. Produksi pertanian tanaman pangan diantaranya padi sawah, jagung, kacang tanah dan kedelai. Rata-rata produksi tanaman padi sawah per hektar adalah 6 ton/Ha, jagung sebesar 4 ton/Ha, kedelai sebesar 1 ton/Ha dan kacang tanah sebesar 1,07 ton/Ha. Sedangkan tanaman hortikultura rata-rata produksi per hektar untuk tanaman bawang merah sebesar 16,51 ton/Ha, cabai rawit sebesar 26,78 ton/Ha, tomat sebesar 15,08 ton/Ha, melon sebesar 33,48 ton/Ha, dan semangka sebesar 66,69 ton/Ha.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh karakteristik yang menjadi objek penelitian, dimana karakteristik tersebut berkaitan dengan seluruh kelompok orang (Sekaran, 2006:121-123). Populasi dalam penelitian ini kelompok tani tanaman pangan sebesar 681 kelompok tani. Sedangkan total kelompok tani tanaman pangan di Kecamatan Kapongan sebanyak 119 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan (Sekaran, 2006:121-123). Sampel dalam penelitian ini adalah petani tanaman pangan miskin di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Petani tanaman pangan adalah petani yang memproduksi tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, kedelai, buah-buahan terutama mangga dan sayuran. Pemilihan ini dikarenakan tanaman pangan adalah komoditi utama di bidang pertanian, selain itu petani tanaman pangan secara karakteristik dan problematika pekerjaannya dapat mewakili petani di komoditi lainnya.

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah petani tanaman pangan yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan yang diterapkan oleh BPS yaitu keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp. 150.000 – Rp. 180.000 per bulan, serta bermata pencaharian utama sebagai petani namun tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Sedangkan jumlah responden atau ukuran sampel minimal ditentukan berdasarkan kriteria Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{119}{1 + 119 (0,10)^2} = 54,34$$

Dimana

n : ukuran *sample*

N : besarnya populasi

e : besarnya deviasi yang dapat ditoleransi yaitu 10%

Sampel dalam penelitian ini adalah petani di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang berjumlah 55 orang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan kuisisioner. Ketiga teknik ini pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), dilakukan terhadap berbagai fenomena yang terjadi dilokasi penelitian yang berkaitan dengan faktor kemiskinan ditinjau dari dimensi kultural terhadap petani tanaman pangan di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- b. Wawancara (*interview*), dilakukan terhadap informan (petani tanaman pangan), yang mengetahui secara luas dan mendalam menyangkut variabel-variabel penelitian (*indepth interview*), dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
- c. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden sampel, yaitu petani tanaman pangan miskin di Kabupaten Situbondo.

3.5 Metode Analisa Data

Pada tabel di bawah menjelaskan alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Analisis Data dan Sumbernya

| No. | Permasalahan | Alat Analisis | Jenis dan Sumber Data |
|-----|--|----------------------|--|
| 1. | Karakteristik sosial ekonomi kelompok petani miskin dan karakteristik wilayah kemiskinan petani. | Analisis deskriptif. | Kuesioner yang dibagikan terhadap responden, data publikasi BPS Kabupaten Situbondo dan RDKK Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. |
| 2. | Keterkaitan antara faktor utama penyebab petani miskin. | Analisis faktor. | Kuesioner yang dibagikan terhadap responden. |
| 3. | Strategi prioritas mengurangi kemiskinan petani. | Analisis faktor | Data publikasi BPS Kabupaten Situbondo dan data RPJMD Kabupaten Situbondo. |

3.5.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah suatu cara analisa langsung dari hasil *review* dan tabel dengan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam tabel seperti rata-rata, persentase, elastisitas dan ukuran statistik lainnya. Data yang ada kemudian dideskripsikan dengan melihat tabel-tabel yang ada pada sumber data sehingga dapat memberikan gambaran secara umum dari kondisi wilayah yang terkait dengan penelitian ini. Gambaran umum yang didapatkan digunakan lebih lanjut untuk menjelaskan karakteristik sosial ekonomi kelompok petani miskin di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Hasil analisis deskripsi wilayah yang didapatkan kemudian juga digunakan untuk menjelaskan karakteristik wilayah kemiskinan di area pedesaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

3.5.2 Analisis Faktor

Pada dasarnya analisis faktor atau analisis komponen utama mendekati data pada suatu pengelompokan atau pembentukan suatu variabel baru yang berdasarkan adanya keeratan hubungan antardimensi pembentuk faktor atau adanya konfirmatori sebagai variabel baru atau faktor. Pada analisis faktor (*factor analysis*) dapat dibagi dua macam yaitu analisis komponen utama (*principal component analysis = PCA*) dan analisis faktor (*factor analysis = FA*). Kedua analisis tersebut bertujuan menerangkan struktur ragam-peragam melalui kombinasi linear dari variabel-variabel pembentuknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor atau komponen adalah variabel bentukan bukan variabel asli. Secara umum analisis faktor atau analisis komponen utama bertujuan untuk mereduksi data dan menginterpretasikannya sebagai suatu variabel baru yang berupa variabel bentukan.

Dalam analisis regresi faktor (*factor regression*), maka analisis faktor akan merupakan tahap antara suatu analisis statistika dari data awal untuk membentuk variabel baru yang akan menuju ke analisis regresi. Oleh karena itu, analisis faktor digunakan sebagai input dalam membangun analisis regresi yang lebih lanjut, demikian pula dalam analisis gerombol atau *cluster analysis* di mana faktor atau variabel baru yang terbentuk dipergunakan sebagai input untuk

melakukan analisis pengelompokan terhadap suatu set data. Analisis faktor merupakan salah satu teknik analisis statistika multivariate yang menitik beratkan pada data yang mempunyai hubungan yang sangat erat secara bersama-sama pada segugusan variabel, tanpa membedakan antara variabel tergantung atau variabel endogen Y dan variabel bebas atau variabel eksogen X, cara ini disebut sebagai metode antarketergantungan (*independence methods*).

Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak (*random quantities*) yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Selain tujuan utama analisis faktor, terdapat tujuan lainnya adalah:

- a. Tujuan pertama untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal, dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten atau konstruk atau variabel bentukan.
- b. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi adanya hubungan antarvariabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk, dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antarfaktor dengan komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor kofirmatori.
- c. Tujuan ketiga adalah untuk menguji valisitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori.
- d. Tujuan keempat salah satu tujuan analisis faktor adalah validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya, sehingga setelah terbentuk faktor, maka peneliti sudah mempunyai suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis faktor.

Penelitian ini menggunakan analisis faktor konfirmatori (CFA) karena secara apriori berdasarkan teori dan konsep yang sudah diketahui dipahami atau ditentukan sebelumnya, maka dibuat sejumlah faktor yang akan dibentuk, serta variabel apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing faktor yang dibentuk dan sudah pasti tujuannya. Pembentukan faktor konfirmatori (CFA) secara sengaja berdasarkan teori dan konsep, dalam upaya untuk mendapatkan variabel baru atau faktor yang mewakili beberapa item atau sub-variabel, yang merupakan

variabel teramati atau *observerb variable*. Pada dasarnya tujuan analisis faktor konfirmatori adalah: pertama untuk mengidentifikasi adanya hubungan antarvariabel dengan melakukan uji korelasi. Tujuan kedua untuk menguji valisitas dan reliabilitas instrumen. Dalam pengujian terhadap valisitas dan reliabilitas instrumen atau kuisner untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan reliabel dengan analisis faktor konfirmatori.

Dalam merancang sebuah model analisis faktor perlu diperhatikan untuk dapat membentuk sebuah faktor paling tidak mewakili tiga variabel terobservasi atau item atau sub-variabel. Walaupun terdapat beberapa contoh hasil penelitian di mana faktor hanya dibentuk oleh dua variabel terobservasi, tetapi sangat disarankan berdasarkan pertimbangan problem indentifikasi, sebaiknya faktor dibentuk lebih dari dua item. Untuk proses uji validasi reliabilitas dengan metode analisis faktor konfirmatori ada beberapa macam syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pada tahap pertama menilai apakah semua sub-variabel atau item atau indikator pembentuk faktor layak untuk diikutkan pada analisis faktor atau tidak. Apabila tidak layak maka sub-variabel tersebut tidak diikutkan sertakan pada analisis faktor, dan sebaliknya apabila sub-variabel tersebut layak maka diikutkan pada analisis.
- b. Pada tahap kedua, item-item yang tidak layak untuk difaktorkan, maka dilakukan faktoring atau mereduksi item dengan jalan sub-variabel yang tidak layak difaktorkan dikeluarkan dari analisis faktor. Selanjutnya, dilakukan analisis ulang, sehingga terbentuk satu faktor yang dapat mewakili sub-variabel dengan item pembentuk faktor yang baru.
- c. Pada langkah selanjutnya, setelah faktornya terbentuk, maka dapat dilakukan analisis data lanjutan dengan menggunakan nilai skor faktor (SF).

3.6 Uji Instrumen

Dalam suatu penelitian, data mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada

kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Benar tidaknya suatu data sangat menentukan akurat atau tidaknya data tersebut. Hal ini tergantung pada baik tidaknya proses pengumpulan data. Sedangkan instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu validitas dan reliabilitas.

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2005) uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis konfirmatori pada masing-masing variabel laten. Indikator-indikator dari suatu variabel dikatakan valid jika loading factor signifikan pada ($\alpha = 5,00\%$).

Cara pengukuran analisa butir tersebut adalah dengan cara skor-skor yang ada pada butir dikorelasikan dengan skor total, dengan menggunakan rumus *product moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan:

| | |
|--------------|---|
| r_{xy} | : Koefisien korelasi |
| X | : Skor butir |
| Y | : Skor total |
| N | : Jumlah responden (Arikunto, 2006:170) |
| ΣX^2 | : Jumlah kuadrat X |
| ΣY^2 | : Jumlah kuadrat Y |

Kemudian hasil r_{xy} hitung dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifikan 5 %. Jika harga r_{xy} hitung $>$ r tabel, maka butir instrument dikatakan valid, dan sebaiknya jika harga r_{xy} hitung $<$ r tabel maka butir instrumen tersebut dikatakan tidak valid (Arikunto, 2006:171).

3.6.2 Uji Reabilitas

Menurut Sugiyono (2005) Pengertian Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reabilitas tes adalah tingkat kejelasan (konsistensi) suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun ditekankan pada situasi yang berbeda-beda.

Menurut Sukadji (2000) reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi berarti reliabilitas tinggi. Pengujian reliabilitas instrumen, dapat digunakan uji reliabilitas internal yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari suatu hasil pengetesan dengan rumus Alpha, sebagai berikut Bentuk uraian dengan rumusnya adalah:

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

r_i : Reliabilitas instrument

k : Banyak butir soal

$\Sigma\sigma_b^2$: Jumlah varian butir

σ_t^2 : Varian total

Untuk mencari varian butir digunakan rumus (Arikunto, 2006:184):

$$\sigma^2 = \frac{\sum(X)^2 - \frac{\sum(X)^2}{N}}{N}$$

Keterangan:

σ^2 : varian setiap butir

X : jumlah skor butir

N : responden

Adapun reliabilitas yang diperoleh dikonsultasikan dengan r produk moment dengan total signifikansi 5%, instrumen dikatakan reliabilitas jika r hitung $>$ r tabel.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang diteliti terkait faktor-faktor penyebab kemiskinan, yaitu:

a. Karakteristik wilayah.

Peneliti melihat bahwa tempat tinggal petani atau lingkungan tempat ia bekerja berpengaruh pada pola hidup yang mereka terapkan. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota/keramaian membuat warga lebih banyak berdiam diri di rumah.
2. Daerah pedesaan yang tanahnya subur dan udaranya segar sangat cocok untuk usaha pertanian, sehingga petani enggan pindah ke daerah perkotaan yang lebih padat dan polusi.
3. Warga miskin di pedesaan yang tidak memiliki tanah sendiri, bisa menumpang mendirikan rumah berbahan bambu (rumah *gedeg*) dan menjadi *magar sari* atau ikut menjaga lingkungan secara sukarela tanpa dibayar, sebagai ungkapan terima kasih pada pemilik tanah.
4. Tinggal di wilayah pedesaan menjadikan masyarakatnya homogen, pola hidup yang sama dan cenderung tidak berkembang atau berkembang namun sangat lambat.

b. Struktur Ekonomi dan sosial.

Struktur ekonomi dan sosial di daerah pedesaan cenderung bergerak lebih lambat dari pada di perkotaan. Indikatornya sebagai berikut:

1. Laju perekonomian di daerah pedesaan bergerak lebih lambat karena pusat akomoditas barang (jual/beli dalam skala besar) berpusat di daerah perkotaan.
2. Harga barang-barang yang dijual di pedesaan lebih murah dari pada di kota.
3. Karakter sosial masyarakat pedesaan lebih bersifat paguyuban dan gotong royong, berbeda dengan perkotaan yang lebih individualistis.

4. Pola pikir petani yang cenderung menerima kondisi (kemiskinan mereka) apa adanya karena anggapan sudah merupakan takdir Tuhan YME, sehingga tidak memiliki motivasi lebih untuk mengembangkan usaha dan mengubah nasib.

c. Sarana dan prasarana.

Kemajuan teknologi atau pengembangan sarana dan prasarana di daerah pedesaan oleh pemerintah, kurang dirasakan efeknya. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih berfokus atau menangani pengembangan sarana dan prasarana di perkotaan. Akibatnya daerah pedesaan selalu tertinggal. Adapun indikatornya adalah:

1. Akses jalan raya dari desa ke kota jauh dan apabila ada kerusakan jalan tidak ditangani dengan cepat oleh pemerintah.
2. Jalan-jalan di pedesaan mayoritas masih jalan tanah bukan aspal, sehingga apabila hujan sangat mengganggu penggunaannya karena banyak kubangan.
3. Pembangunan sarana dan prasarana umum seperti listrik, jalan, rumah sakit, telepon, dan sebagainya berkembang sangat lambat. Contoh: tidak semua jalan di desa ada lampu penerangan jalan, sehingga ketika malam aktivitas penduduk dihabiskan di rumah saja.
4. Jumlah sekolah berkualitas dengan didukung prasarana belajar mengajar di pedesaan masih jauh jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah kota, sehingga pendidikan yang diterima anak tidak semaju di kota.

d. SDM.

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek paling penting dalam pembangunan daerah. Kualitas SDM sangat berpengaruh pada berjalan tidaknya suatu program pembangunan daerah. Apabila ingin daerah cepat maju, pemerintah terlebih dahulu harus membangun sumber daya manusianya lebih berkualitas. Adapun indikatornya:

1. Sekolah di pedesaan tidak sebaik di kota dalam memberikan pendidikan terhadap murid, sehingga kualitas mereka mayoritas cenderung kurang jika dibandingkan dengan murid-murid di sekolah perkotaan.

2. Karena kurangnya biaya banyak anak-anak yang putus sekolah atau hanya bersekolah sampai SD atau SMP, jarang yang bisa melanjutkan pendidikan ke SMA bahkan universitas.
 3. Masyarakat di pedesaan masih berpola pikir bahwa pendidikan yang tinggi terutama untuk perempuan adalah hal yang tidak perlu, karena penghasilan didapat dari bekerja keras.
 4. Apabila ada program-program dari pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan seperti program peningkatan keterampilan membuat cinderamata atau perkakas dapur, dirasa kurang mengena oleh masyarakat pedesaan sehingga peminatnya sedikit. Pemerintah juga tidak menjalankan program secara berkelanjutan.
- e. Kearifan lokal/budaya.

Masyarakat pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Masyarakat di pedesaan hidup bergotong royong, dimana kekerabatan sangat diutamakan, bersikap ramah walau dengan orang asing, sehingga mereka cenderung homogen. Masyarakat kota yang cenderung individualis dan berpola pikir berkembang membuat karakter setiap individunya lebih beragam. Mereka tidak bermasalah jika harus terlibat persaingan ketat antar sesama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Adapun indikatornya:

1. Adanya budaya di masyarakat pedesaan seperti ‘makan tidak makan, asal kumpul’, merupakan wujud nilai kekeluargaan yang diutamakan dan erat. Sisi negatifnya hal ini mengakibatkan kecenderungan mereka untuk tinggal di desa saja dari pada mengubah nasib di kota.
2. Budaya tradisional yang masih sangat melekat seringkali membuat masyarakat desa dianggap ketinggalan zaman.
3. Nilai-nilai agama juga sangat berperan penting, membuat masyarakat desa menjadi melihat hidup lebih arif. Tetapi adanya pendapat bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat di desa adalah bagian dari takdir.
4. Adanya masyarakat pedesaan yang enggan untuk diajak maju, hal ini karena mereka menganggap kemajuan yang ditawarkan teknologi terlebih pengaruh budaya asing hanya akan merusak moral anak-anak mereka.